



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Jakarta, Januari 2017

Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
		2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
		3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
		4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	100%
		5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%
		6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
		7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	40%
		8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44
		2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44
		3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%

Program

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden | Rp42.149.737.000,00 |
| 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara | Rp355.480.828.000,00 |

Jakarta, Januari 2017
Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

Pratikno



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Setya Utama
jabatan : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,

Setya Utama

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Menteri Sekretaris Negara di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disetujui instansi terkait	100%
		Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,00
		Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP
		Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan naskah dinas, dokumen/arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2.	Tersedianya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,00
3.	Tersedianya layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara	3,00
		Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu	3,00
4	Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kualitas pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00

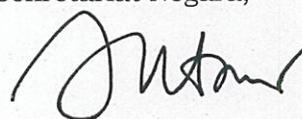
Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Rp 245.779.575.000
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp 9.371.158.000

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Jakarta, Januari 2017
Sekretaris Kementerian
Sekretariat Negara,



Setya Utama



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110 Telepon (021) 23545001,
Faksimile (021) 3859786, Situs: www.setneg.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Darmansjah Djumala
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,

Darmansjah Djumala

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT PRESIDEN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden.	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden	4,55 dalam skala 6
		2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden	4,55 dalam skala 6
		3. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan pers, media, dan informasi	4,55 dalam skala 6
		4. Indeks kepuasan pengguna layanan istana-istana Kepresidenan dan museum	4,55 dalam skala 6
		5. Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan anggaran, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	4,55 dalam skala 6
		6. Indeks kepuasan pengguna layanan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya	4,55 dalam skala 6

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

Rp 227.937.109.000

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Jakarta, Januari 2017
Kepala Sekretariat Presiden,



Darmansjah Djumala



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Mohamad Oemar
jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,

Pratikno

Mohamad Oemar



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi penganggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan akuntansi barang milik negara serta manajemen kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
2	Terjaminya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada wakil presiden	2	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,33
		3	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,33
		4	Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%
		5	Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%
		6	Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen
		7	Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 dokumen



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

Kegiatan:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Anggaran:

Rp.127.543.719.000

Rp. 3.456.281.000

Jakarta, Januari 2017

Menteri Sekretaris Negara,

Kepala Sekretariat Wakil Presiden,

Pratikno

Mohamad Oemar



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Marsda TNI Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,

Marsda TNI Trisno Hendradi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang berkualitas	1. Persentase pelayanan administrasi personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden 2. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman 3. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100% 100% 100%
2.	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden	1. Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden	3,83 (skala 5)

Program

1. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara

Anggaran

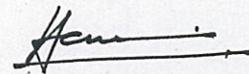
Rp23.052.817.000
Rp6.947.183.000

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Jakarta, Januari 2017
Sekretaris Militer Presiden,



Marsda TNI Trisno Hendradi



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sapta Murti
Jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2017

Pihak Pertama,

Muhammad Sapta Murti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%

Kegiatan

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Rp 319.960.000
2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp 443.524.000
3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Rp 303.606.000
4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp 317.507.000
5. Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.051.821.000

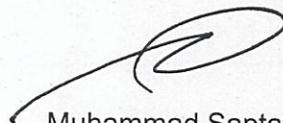
Menteri Sekretaris Negara



Pratikno

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan



Muhammad Sapta Murti



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dadan Wildan
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2017
Pihak Pertama,

Dadan Wildan

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik	100%
2	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	40%
3	Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar	100%

Kegiatan

1. Pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, dan lembaga daerah
2. Pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik
3. Penanganan pengaduan masyarakat
4. Penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

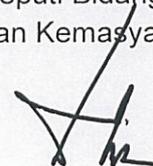
Rp3.411.632.000,-

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Jakarta, Januari 2017
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan,



Dadan Wildan



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Cecep Sutiawan
jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

Pratikno

Pihak Pertama,

Cecep Sutiawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
	Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
	Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama, serta alih status perwira tinggi TNI/Polri sebagai Aparatur Sipil Negara yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia	Persentase pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	92%
	Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,4 dalam skala 5
	Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	4,1 dalam skala 5
	Indeks peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan dan pelatihan	3,6 dalam skala 5
Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja	Hasil evaluasi kelembagaan di Kementerian Sekretariat Negara	Kategori II (50-74,99)
	Persentase hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori Baik	70%
	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)	60%

Program

1. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran
Rp. 421,431,000.000,-

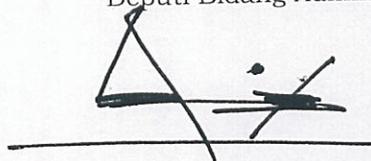
Rp.14,116,342,000.000,-

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Jakarta, Januari 2017
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Cecep Sutiawan



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3865092

Situs: www.wantimpres.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Subiyantoro
Jabatan : Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Adiningsih
Jabatan : Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,

Sri Adiningsih

Pihak Pertama,

Subiyantoro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	88%

Program

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

Rp 36.300.000.000,00

Jakarta, 3 Januari 2017

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden,



Sri Adiningsih

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Subiyantoro